TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SAKPA PADA INSTANSI PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN BANDUNG

Sri Retna Ramdaniyah
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung. Fenomena yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan adalah kadang terjadi kekeliruan penempatan akun terutama untuk setoran yang menggunakan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) dan SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja), pada saat proses memasukkan data transaksi dalam aplikasi keuangan SAKPA pengguna kadang salah memasukkan data transaksi sehingga menghambat proses penyusunan laporan keuangan dan ketika dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi kadang terjadi ketidakcocokan dengan data yang dimiliki dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan data yang digunakan adalah prosedur serta data laporan keuangan pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung. Data yang diperoleh penulis meliputi data primer dan data sekunder yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, hanya saja ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya sehingga menghambat proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian dokumen-dokumen sumber yang ada dalam penyusunan laporan keuangan pun sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, akan tetapi sebaiknya dokumen-dokumen sumber tersebut terlebih dahulu di konfirmasikan ke bagian pengelola laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Kata kunci : Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan, Dokumen-dokumen sumber

ABSTRACT

This research was conducted to know the procedure of preparation of financial statements using the application SAKPA (User Authorization Budget Accounting System) at Agency Center Groundwater Resources and Environmental Geology Bandung. Phenomena that occur in the preparation of financial statements is a mistake sometimes occurs primarily account for deposit placement that uses SSBP (letter of non-tax payments) and SSPB (deposit refund letter shopping), during the process of entering transaction data in financial applications SAKPA sometimes users enter transaction data that is hindering the process of preparation of financial statements and when reconciliation or data matching sometimes there is a mismatch with the data held on the KPPN (Office of the State Treasury).

The method used is descriptive method and data used are the procedures and financial statement data at Agency Center Groundwater Resources and Environmental Geology Bandung. The data obtained by the authors include primary data and secondary data with the data collection is done through field studies conducted by observation, interviews, documentation and literature.

The results of this research indicate that the procedure of preparation of the financial statements are in accordance with government regulations, it's just that there are some obstacles in its implementation thus inhibiting the process of preparing financial statements. Then the documents in the preparation of the financial statements are in accordance with government

regulations, but should the source documents beforehand manager confirmed to the financial statements in order to avoid errors in the preparation of the financial statements.

Keyword : The procedure for preparing the financial statements, source document

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyusun paket undang-undang keuangan negara yaitu : Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada tahun 2005 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam perkembangannya, PP Nomor 24 tahun 2005 diperbaharui menjadi PP Nomor 71 tahun 2010. Standar ini dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD (Irene Liana : 2011).

Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung sebagai satuan kerja merupakan Instansi pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tentunya berkewajiban untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan dengan transparan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumanto,SE selaku Penata Laporan Keuangan di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung mengemukakan bahwa proses penyusunan laporan keuangan Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung dikerjakan oleh bagian pengelola SAI (Sistem Akuntansi Instansi) yang berada dibagian UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), penyusunan laporan keuangan dibuat berdasarkan adanya transaksi-transaksi yang terjadi dan dibuktikan dengan dokumen sumber. Dokumen sumber tersebut berupa dokumen pendapatan yang terdiri dari estimasi pendapatan dan dokumen penerimaan pendapatan yang berupa dokumen SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak), dokumen pengeluaran yang terdiri dari SPM (Surat Perintah Membayar) yang sudah diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nya dan SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja). Kemudian dokumen sumber tersebut diproses dengan bantuan aplikasi keuangan yaitu aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran).

Aplikasi SAKPA dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai salah satu direktorat dibawah naungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan memberikan kemudahan pembuatan laporan standar akuntansi pemerintah di Unit Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). SAKPA menyediakan enam menu proses yaitu Tabel Referensi, Transaksi, Terima SKPA, Proses, Rekonsiliasi BMN, Laporan, *Utility* dan menu Selesai (Alifvia Arvi Ningrum dan Oky Dwi Nurhayati : 2012).

Dengan adanya aplikasi keuangan ini jelas sangat membantu, karena tidak seperti mengerjakan manual yang harus benar-benar mengerjakan dari awal sampai akhir, setiap angka-angka dan akun-akun akan terotomatis dengan sendiri karena sudah terprogram. Dokumen-dokumen sumber yang sudah diproses oleh SAI dengan bantuan aplikasi SAKPA tersebut kemudian dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi antara SAI dengan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). KPPN merupakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berada

dibawah naungan Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mencairkan dana serta mengelola arus kas masuk dan arus kas keluar yang ada di Instansi Pemerintahan. Setelah hasil dari rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi tersebut sama antara SAI dengan KPPN, kemudian di keluarkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang berarti pencatatan yang ada di SAI sudah sama dengan pencatatan yang ada di KPPN.

Namun demikian ada beberapa masalah dalam proses penyusunan laporan keuangan yang ada di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung, masalah yang terjadi yaitu kadang terjadi kekeliruan penempatan akun terutama untuk setoran yang menggunakan SSBP dan SSPB didalam dokumen sumber yang ada, kemudian pada saat proses memasukkan data transaksi dalam aplikasi keuangan SAKPA, pengguna kadang salah memasukkan data transaksi sehingga menghambat proses penyusunan laporan keuangan dan ketika dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi kadang terjadi ketidak cocokan dengan data yang dimiliki dari KPPN.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memilih tema utama dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan judul :

"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SAKPA PADA INSTANSI PUSAT SUMBER DAYA AIR TANAH DAN GEOLOGI LINGKUNGAN BANDUNG".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, masalah-masalah yang ada didalam penyusunan laporan keuangan pada instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Kadang terjadi kekeliruan penempatan akun didalam dokumen sumber, terutama setoran yang menggunakan SSBP dan SSPB.
2. Pada saat proses memasukkan data dalam aplikasi keuangan SAKPA, pengguna kadang salah memasukkan data sehingga menghambat proses penyusunan laporan keuangan.
3. Ketika dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi kadang terjadi ketidak cocokan dengan data yang diperoleh dari KPPN.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAKPA pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung di bagian pengelola SAI (Sistem Akuntansi Instansi) ?
2. Dokumen-dokumen apa saja yang ada dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAKPA pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung di bagian pengelola SAI (Sistem Akuntansi Instansi) ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAKPA pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAKPA pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung.
2. Untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang ada dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAKPA pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung ?

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini yaitu :

1.5.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis
   Dapat menambah pengetahuan tentang kinerja pada Instansi Pemerintahan karena penelitian ini sebagai sarana dan media untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari sesuai dengan teori tentang prosedur penyusunan laporan keuangan pada Instansi Pemerintah.
b. Bagi Pembaca
   Dapat menambah pengetahuan umum tentang prosedur penyusunan laporan keuangan pada Instansi Pemerintah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Instansi
   Hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau tambahan dan masukan bagi Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung. Diharapkan juga dapat membantu dalam berbagai aktivitas Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung.
b. Bagi Peneliti Lain
   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut **Mardiasmo (2009:159)** adalah :
"Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik".

Sedangkan menurut **Nunuy Nur Afiah (2010:161)** laporan keuangan adalah :
"Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan".

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah atau sektor publik adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.

2.2 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut **Nunuy Nur Afiah (2010:164)** prosedur penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar masing-masing akun.

Menurut **Abdul Hafiz Tanjung (2013)** dalam bukunya yang berjudul **"Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual"** setelah semua transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu pemerintah daerah, baik transaksi yang berhubungan dengan anggaran maupun dengan neraca dicatat dalam jurnal dan diposting ke akun di buku besar. Kemudian tahap selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan komponen laporan keuangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu :

2.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual telah menetapkan basis pencatatan yang digunakan adalah akrual, namun dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan dengan mengguanakn basis kas (PSAP BA 02 paragraf 03 dan 04).

Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

2.1.2 Laporan Realisasi Anggaran

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual telah menetapkan basis pencatatan yang digunakan adalah akrual, namun dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

tetap disajikan dengan mengguanakn basis kas (PSAP BA 02 paragraf 03 dan 04).

Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).

2.1.3 Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2.1.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

PSAP BA 12 paragraf 13 menjelaskan bahwa struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :

a. Pendapatan-LO;
b. Beban;
c. Surplus.Defisit dari operasi;
d. Kegiatan non operasional;
e. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa;
f. Pos luar biasa;
g. Surplus/Defisit-LO.

2.1.5 Laporan Arus Kas

PSAP BA 03 paragraf 15 mendefinisikan laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

2.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

PSAP BA 01 paragraf 101 menjelaskan lebih lanjut bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

a. Ekuitas awal;
b. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
   1. Koreksi kesalahan mendasar dari pesediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
   2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d. Ekuitas Akhir

2.1.7 Catatan atas Laporan Keuangan

PSAP BA 01 paragraf 83 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
b. Menyediakan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan dan ekonomi makro.
c. Menyediakan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
d. Menyediakan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
g. Menyediakan informasi lainya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut **Supriati (2011:38)** mengemukakan bahwa :

"Objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan".

Sedangkan menurut **Iwan Satibi (2011:74)** mendefinisikan objek penelitian adalah sebagai berikut :

"Objek penelitian secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif, yang meliputi karakteristik wilayah, sejarah pengembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud".

Dari definisi objek penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan, yang meliputi karakteristik wilayah, sejarah pengembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan.

Menurut **Supriati (2011:30)** mengemukakan bahwa :

"Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitain dilaksanakan".

Sedangkan menurut **Ulber Silalahi (2012:12)** mendefinisikan metode penelitian adalah sebagai berikut :

"Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau masalah tersebut".

Dari definisi metode penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau masalah tersebut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan secara langsung pada instansi yaitu Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung.

   Adapun cara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Pengamatan (*Observasi*)

      Menurut **Juliansyah Noor (2012:140)** teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan penelitian ini dilakukan pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung.

   b. Wawancara (*Interview*)

      Menurut **Ulber Silalahi (2012:312)** wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan bagian penata laporan keuangan di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung.

   c. Dokumentasi (*Documentation*)

      Menurut **Mahi M. Nikmat (2011:83)** teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Adapun dokumen yang didapat dari Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung adalah dokumen sumber yang ada didalam penyusunan laporan keuangan berupa dokumen SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak),

dan SSPB (Surat Setoran Pemberian Pajak).

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, literature-literatur, dan bahan bacaan lainnya secara teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun buku-buku yang dipelajari oleh peneliti adalah buku-buku yang membahas tentang laporan keuangan pada Instansi Pemerintahan atau Sektor Publik.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian tersebut berupa data-data yang ada kaitannya dengan prosedur penyusunan laporan keuangan. Data-data tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian sehingga tujuan penelitian ini tercapai.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dengan Menggunakan Aplikasi SAKPA pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung

Penyusunan laporan keuangan yang ada di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut **Nunuy Nur Afiah (2010:15-17)** prosedur penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yaitu tahap pengidentifikasian dokumen sumber, tahap penjurnalan, dan tahap posting ke buku besar masing-masing akun.

Prosedur penyusunan laporan keuangan di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung sudah sesuai dengan teori Nunuy Nur Afiah. Akan tetapi penyusunan laporan keuangan di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung proses akuntansi yang dilakukan terutama pada tahap penjurnalan dan posting ke buku besar sudah menggunakan bantuan aplikasi sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangannya. Aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran), aplikasi SAKPA ini sangat membantu Tim Kerja SAI dalam menyusun laporan keuangan.

Meskipun sudah menggunakan bantuan aplikasi SAKPA dalam penyusunan laporan keuangan, pada kenyataanya masih ada masalah dalam proses penyusunannya yaitu pengguna kadang keliru dalam penempatan akun terutama didalam dokumen sumber berupa setoran SSBP dan SSPB dan pengguna kadang keliru memasukkan data transaksi seperti yang ada dalam gambar 4.12 dalam proses memasukkan dokumen transaksi penerimaan negara berupa SSBP dan pada gambar 4.15 dalam proses menambahkan data transaksi pengembalian belanja berupa SSPB. Hal ini terjadi karena ketidaksamaaan antara keterangan yang ada didalam transaksi dengan kode transaksi yang sebenarnya sehingga harus dilakukan proses rekonsiliasi kembali dan berakibat menghambat proses penyusunan laporan keuangan.

Dalam prosedur penyusunan laporan keuangan di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung setelah dilakukan proses akuntansi dengan menggunakan bantuan aplikasi SAKPA, kemudian dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi dengan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagaimana yang ada dalam Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Akan tetapi ketika dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi kadang terjadi ketidak cocokan data yang diperoleh dari KPPN.

Menurut **Abdul Hafiz Tanjung (2013)** laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan menurut teori Abdul Hafiz Tanjung berbeda dengan laporan keuangan yang disajikan di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung, yaitu hanya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) saja. Sedangkan Laporan Arus Kas hanya dibuat oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.2.2 Dokumen-dokumen dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan dengan Menggunakan Aplikasi SAKPA pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung

Dokumen-dokumen yang terdapat didalam penyusunan laporan keuangan di Instani Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung merupakan dokumen sumber yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

Menurut **Nunuy Nur Afiah (2010)** dalam bukunya yang berjudul **"Akuntansi Pemerintah:Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah"** dokumen sumber yang ada dalam penyusunan laporan keuangan yaitu dikelompokkan berdasarkan transaksi-transaki :

1. Dokumen Sumber Transaksi Pendapatan Daerah
2. Dokumen Sumber Transaksi Belanja Daerah
3. Dokumen Sumber Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
4. Dokumen Sumber Transaksi Aset Daerah
5. Dokumen Sumber Transaksi Kewajiban Daerah
6. Dokumen Sumber Transaksi Ekuitas Dana Daerah, yang terdiri dari :
   a. Dokumen Sumber Transaksi Ekuitas Dana Lancar
   b. Dokumen Sumber Transaksi Ekuitas Dana Investasi
   c. Dokumen Sumber Transaksi Ekuitas Dana Cadangan

Dokumen sumber yang telah dipaparkan menurut teori **Nunuy Nur Afiah** merupakan dokumen sumber yang ada secara umum dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau instansi pemerintahan, dokumen-dokumen sumber tersebut sesuai dengan yang ada dalam penyusunan laporan keuangan di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung.

Kemudian dokumen sumber yang ada di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 57/PB/2013 Bagian Kedua Pasal 5 tentang Dokumen Sumber Laporan Keuangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Prosedur penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung disusun dengan menggunakan bantuan aplikasi SAKPA untuk memudahkan Tim Kerja SAI dalam melaksanakan pengolahan dan pemrosesan dokumen sumber dalam rangka menghasilkan laporan keuangan. Akan tetapi, masih terdapat masalah dalam penyusunan laporan keuangannya yaitu pengguna kadang keliru dalam penempatan akun terutama didalam dokumen sumber berupa SSBP dan SSPB. Pengguna juga kadang keliru memasukkan data transaksi berupa SSBP dan SSPB tersebut. Kemudian ketika dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi kadang terjadi ketidak

cocokan data yang diperoleh dari KPPN.

2. Dokumen-dokumen dalam prosedur penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAKPA pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung terdiri dari dokumen sumber penerimaan pendapatan yang berupa dokumen SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak), dokumen pengeluaran yang terdiri dari SPM (Surat Perintah Membayar) yang sudah diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nya dan SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja), memo penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal koreksi dan jurnal aset, dan dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/Lembaga seperti BAST (Berita Acara Serah Terima Barang), SK Penghapusan, LHOF (Laporan Hasil Opname Fisik), dan lain sebagainya. kemudian dokumen yang ada di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

5.2 Saran

1. Dalam prosedur penyusunan laporan keuangan yang ada di Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung terutama didalam penyusunan dokumen sumber transaksi SSBP atau SSPB dimana dokumen sumber tersebut merupakan dokumen sumber yang ada dalam penyusunan laporan keuangan sebaiknya dilakukan oleh pegawai yang paham tentang akuntansi, sehingga resiko kesalahan penempatan akun dalam dokumen sumber transaksi SSBP dan SSPB tersebut tidak terjadi, penyusun dokumen sumber transaksi SSBP dan SSPB juga hendaknya harus benar-benar memastikan bahwa akun yang tertulis diformulir sesuai dengan keterangan transaksi yang ada sehingga ketika dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi dengan KPPN data transaksi yang ada di SAI sama atau cocok dengan yang ada di KPPN.
2. Dokumen-dokumen dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SAKPA pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung sudah sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, akan tetapi sebaiknya dokumen-dokumen sumber tersebut terlebih dahulu di konfirmasikan ke bagian pengelola laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Abdul Hafiz Tanjung. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual, Cetakan Kedua*. Bandung: Alfabeta.

Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra & Maulidah Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Iwan Satibi. 2011. *Teknik Penulisan Skripsi Tesis Disertasi*. Bandung: Ceplas.

Jogiyanto Hartono. 2009. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Publisher.

Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, Cetakan Kedua*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP.

Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mahi M. Nikmat. 2011. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogjakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.

M. Nafarin. 2010. *Penganggaran Perusahaan, Edisi ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.

Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, *Cetakan Kedua*. Bandung:Refika Aditama.

Nunuy Nur Afiah. 2010. *Akuntansi Pemerintah:Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Supriyati. 2011. *Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama*. Bandung: LABKAT UNIKOM.

Ulber Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial, Cetakan Ketiga. Bandung: Refika Aditama.

Undang-undang :

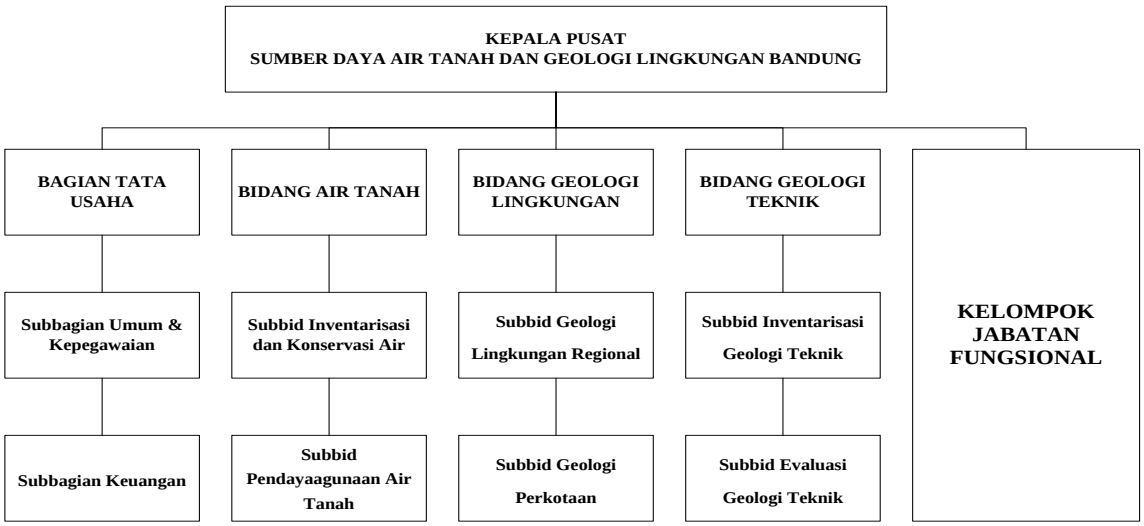
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

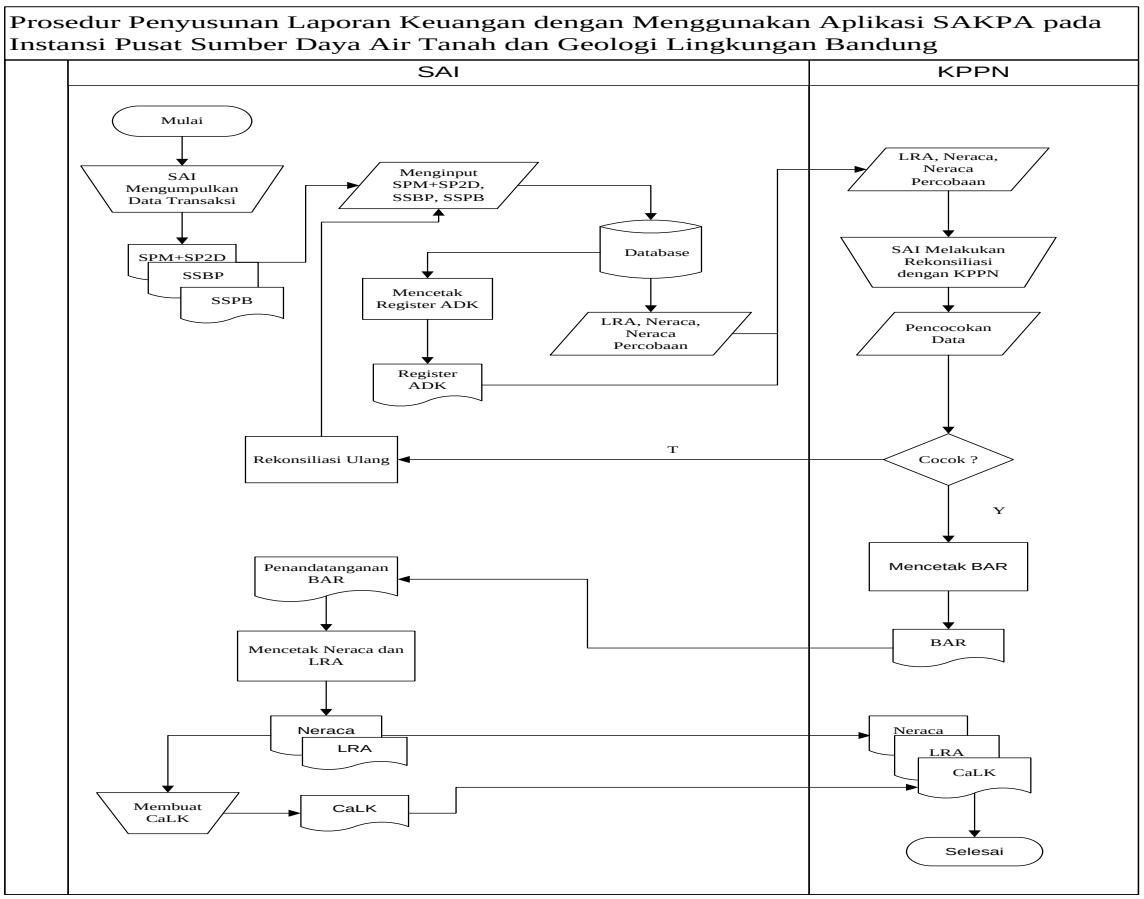
Sumber Internet :

Nurul Yuniar Lediana. 2013. *Pengaruh Efektivitas Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Diakses melalui http://repository.upi.edu/3863/, [27/ 03/ 2014].

Irene Liana. 2011. *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia terhadap Pemberian Opini oleh BPK*. Diakses melalui http://e-journal.uajy.ac.id/644/2/1EA17251.pdf, [27/ 03/ 2014].



Struktur Organisasi
Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung



Gambar 4.1
Flowmap Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dengan Menggunakan Aplikasi SAKPA Pada Instansi Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan Bandung